



Polisi-Jaksa Bidik Proyek Satelit TVRI

Tiga Tersangka Sudah Ditarget

PONTIANAK—Proyek Pengadaan Satelit TVRI bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada TVRI Pontianak melalui pihak ketiga diduga bermasalah. Soalnya institusi Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah mulai melakukan penyidikan.

Saat acara pers gathering antara para awak media dan awak Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jumat (11/4) Aspidsus Kejati Kalbar, Didik Istiyanta tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek tersebut. Namun, katanya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah disampaikan ke Kejati. "Sepertinya ada tersangkanya. Dugaan kami mungkin tiga tersangka. Inisialnya D, S, dan satunya saya lupa siapa itu," ungkapnya blak-blakan kepada wartawan.

Menurut dia karena baru dimulainya penyidikan, pihaknya belum mau membuka lebih jauh. Kemudian kalau ditanyakan seberapa besar kerugian negara, juga belum dapat dipastikan. "Baru awal dimulainya penyidikan," ujarnya seraya berlalu. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Arie Sulisty melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat



Sepertinya ada tersangkanya. Dugaan kami mungkin tiga tersangka. Inisialnya D, S, dan satunya saya lupa siapa itu.

Didik Istiyanta
Aspidsus Kejati Kalbar,

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



Polisi-Jaksa Bidik Proyek Satelit TVRI

Sambungan dari halaman 1

Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar menuturkan Polda Kalbar juga tengah menyelidiki proyek pengadaan satelit TVRI bantuan dari Pemprov Kalbar kepada TVRI Pontianak tetapi melalui pihak ketiga. "Untuk kasus ini Polda Kalbar juga masih dalam tahap penyelidikan. Penyelidikan dimulai karena berdasarkan informasi yang masuk," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, Mukson mengakui sudah ada beberapa saksi diperiksa. Sementara untuk penetapan tersangka masih dalam proses. Pihak Polda juga belum mengetahui seberapa besar kerugian negara. "Kita sedang analisis saksi-saksi dan calon tersangkanya siapa saja. Kita belum dapat umumkan. Yang pasti Polda Kalbar masih menyelidiki secara serius," tutur dia.

Disinggung bagaimana mekanisme proyek pengadaan tersebut? Mukson menyebutkan karena masih dalam penyelidikan, pihaknya tidak dapat membuka secara lebih gamblang. Yang pasti mengenai Proyek Pengadaan Satelit TVRI bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-

pada TVRI Pontianak melalui pihak ketiga.

Stasiun TVRI selaku pemakai tinggal menerima saja. "Hanya untuk pemenang proyeknya masih dalam proses penyidikan kami," katanya lagi. Berhentinya siaran satelit TVRI di Kalbar memang membuat masyarakat seantero Kalimantan Barat berkeleluhan. M. Arif (36) misalnya dari Kota Singkawang tidak dapat menyaksikan dan menonton siaran TVRI khusus menyangkut kejadian di lokal Kalbar. "Iya, sedih juga biasanya dapat melihat siaran berita-berita lokal Kalbar melalui TVRI. Sekarang tidak lagi," ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Barat, Retno Pramudya meminta Proyek Pengadaan Satelit TVRI bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada TVRI Pontianak melalui pihak ketiga diproses sampai tuntas. "Komisi kami mendukung penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan-Polda Kalbar. Hanya kami minta diseriuskan tidak boleh main-main.

Apabila diproses kita minta tersangkanya dipenjarakan. Soalnya sudah ada unsur kerugian negara," ungkapnya, Jumat (11/4) di Ponti-

anak.

Menurut Retno kalau memang nanti adanya penyimpangan berdasarkan hasil audit BPK RI atau BPKP tidak boleh ada kata ditunda. Proses penyidikannya harus diproses hingga tuntas. "Tentu dari hasil audit sangat memungkinkan muncul kerugian negara. Intinya kalau memang ada indikasi tindak pidana korupsi, tidak boleh dibiarkan," ujarnya. "Apalagi undang-undang biasanya memerintahkan kepada kepolisian-kejaksaan wajib memproses lebih jauh," timpal dia.

Retno sekaligus politikus PPP Kalbar bercerita akibat terjadinya temuan BPK RI terkait adanya penyimpangan proyek satelit tahun 2013, untuk pengadaan tahun 2014 tidak diusulkan. Karena tidak diusulkan tentunya merugikan masyarakat Kalimantan Barat.

Masyarakat Kalbar butuh informasi pemberitaan terutama yang berada di daerah. "TVRI salah satu TV nasional harus selalu memberikan informasi terutama buat masyarakat pedalaman. Inilah yang selalu kita gemborkan ketika membahas anggaran pengadaan satelit di DPRD Kalbar," ungkapnya. **(den)**